

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 tentang pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929).

### 2. Buku

Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Indah. Jakarta, 2008 h. 15.

Celina Tri Siwi Kristiyanti,. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008 h. 77

Devi Yulianita, *Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya Di Kota Palangka Raya*, BPOM, Palangkaraya, 2017, h. 58

F. Isjwara, *Op. Cit.*, , h. 177, disalin dari Leslie Lipson, *The Great Issues of Politics*, Bab III, h. 41

- Hamid S. Attamimi, *Cita Negara Persatuan Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, dalam *Cita Negara Persatuan Indonesia*, BP7 Pusat, Jakarta, 1996, h. 124
- Isjwara, F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, h. 100
- Kuntjoro Perbopranoto, *Beberapa Catatan Tata Hukum Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981, h. 40.
- Mac Iver, *Negara Modern*, terjemahan Moertono, Aksara Baru, Jakarta, 1988, h. 11
- M. Nasroen, M. Nasron, *Asal Mula Nrgara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, h. 45.
- N.E. Algra, et. al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, h. 572
- Nur Rachmat, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 2, 2004, h. 24
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 30.
- Philipus M. Hadjon, et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 1994, h. 130-131
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, halaman. 14-15.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, 1984, h. 43.
- Wahyu Simon Tampubolon, 2018, *Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmiah, Univ*

### 3. Website

- <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, Profil Latar Belakang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 10.43 WIB.
- <https://www.pom.go.id/index.php/home/en>. Profile Badan POM National Agency of Drugs and Food Control Republik of Indonesia Badan

Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul 13.01

<https://www.pom.go.id> . Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada 18 Juni 2020, pukul 15.34

#### **4. Lain-Lain**

Hasil wawancara dengan Bpk. Mustajab, Apt., Sebagai Staff dalam Bidang Penyidikan Balai Besar POM Surabaya. Pada tanggal 17 Juni 2020

